

Efektivitas Penataan Tertib Administrasi Pemerintah Gampong Dalam mewujudkan pelayanan public Di Gampong Sagoe Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie

Muhammad Wira Satia

Administrasi Publik, Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Email. mwsatia12@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine, among other things, the extent to which the village government's administrative orderliness has been implemented in providing public services and the obstacles encountered in providing such services. This study employed a descriptive method. Field research and library research were conducted to obtain data. All data obtained were processed and analyzed using a qualitative approach.

The results indicate that data collection on administrative orderliness in public service efforts implemented by the Sagoe Village Government in Muara Tiga District, Pidie Regency has not been carried out properly. Obstacles encountered include the limited capacity of village officials to organize administrative order in public services and the limited facilities and infrastructure owned by the village government. It is recommended that the selection of village officials (Keuchik)/village officials should consider their educational background and other requirements. Missing facilities and infrastructure, such as a village head office and office equipment, need to be immediately completed to maximize service delivery.

Keywords: Organization, Administration, Government, Village

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain adalah untuk mengetahui sejauhmana penataan tertib administrasi Pemerintahan Gampong dalam mewujudkan pelayanan publik telah berjalan dan hambatan apa saja yang ditemui dalam pelayanan publik tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh data perlu melaksanakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Semua data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan tertib administrasi dalam upaya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong Gampong Sagoe di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie belum terselenggara sebagaimana mestinya. Hambatan yang ditemui antara lain adalah terbatasnya kemampuan Perangkat Gampong dalam menata tertib administrasi terhadap pelayanan publik dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong. Disarankan supaya dalam pemilihan Keuchik/Perangkat Gampong perlu diperhatikan latar belakang pendidikan dan syarat lainnya, sarana dan prasarana yang belum ada seperti kantor Keuchik dan perlengkapan kantor perlu dilengkapi segera agar pelayanan yang diberikan lebih maksimal.

Kata Kunci: Penataan, Administrasi, Pemerintah, Gampong,

1. Pendahuluan

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pada pasal 115 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Gampong terdiri dari Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet atau nama lain. Berdasarkan kedudukan Qanun Kabupatern Pidie Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong adalah sebagai alat untuk memperkuat Pemerintahan Gampong agar mampu menggerakkan masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan tertib administrasi Gampong yang meluas dan efektif.

Penjelasan Qanun Nomor. 8 Tahun 2011 telah ditegaskan bahwa Gampong mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam artian mempunyai hak otonomi untuk mengurus urusan rumah tangga Gampong. Dimana untuk menjalankan roda organisasi Pemerintah Gampong itu sendiri dalam rangka penyelenggaraan hal otonomi Gampong. Ini diperlukan adanya suatu lembaga Pemerintahan Gampong yang dibentuk dan berkedudukan secara resmi, dengan kata lain ia mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Gampong sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong disebutkan bahwa, Pemerintah Gampong mempunyai tugas dalam menyelenggarakan Pemerintahan secara otonomi, dan melaksanakan pembangunan, melestarikan adat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong serta meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat Islam di Gampong tersebut.

Keuchik merupakan hakim perdamaian

bagi Gampongnya yang dibantu oleh Imum Meunasah dan Tuha Peut Gampong, Jika ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian dapat meneruskan kepada Imum Mukim dan Keputusan Imum Mukimlah yang bersifat akhir dari permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut dan keputusan sangat mengikat, dari semua keputusan yang diputuskan sebelumnya.

Perangkat Gampong dapat membantu Keuchik untuk melaksanakan, menyelesaikan dan serta menyelenggarakan terhadap fungsi, tugas serta kewajibannya sebagaimana Kepala Pemerintahan Gampong. Perangkat Gampong terdiri dari unsur-unsur staf yaitu Sekretaris Gampong yang dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh beberapa orang staf seperti Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Keistimewaan Aceh serta Kesejahteraan Sosial dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengamatan sementara yang telah penulis kemukakan diatas tersebut dan disertai juga penelitian yang dilaksanakan penulis di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, adalah memperlihatkan bahwa Pendataan Tertib Administrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, guna untuk dalam mewujudkan pelayanan publik belumlah sepenuhnya dapat berhasil dikarenakan dijumpai berbagai faktor kendala atau hambatan yang terjadi.

Beranjak dari penjelasan yang telah disajikan dalam latar belakang permasalahan, maka disini peneliti mencoba merumuskan permasalahan yaitu :

1. Sejauhmana efektivitas penataan tertib administrasi Pemerintah Gampong telah dilaksanakan dalam mewujudkan pelayanan publik di Gampong Sagoe Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie
2. Hambatan apa saja yang ditemui sehingga pendataan tertib administrasi Pemerintah

Gampong dalam mewujudkan pelayanan publik belum terlaksana secara maksimal ?

Adapun yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pendataan tertib administrasi Pemerintah Gampong dalam mewujudkan pelayanan publik di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pendataan tertib administrasi Pemerintah Gampong guna mewujudkan pelayanan publik di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pendataan tertib administrasi Pemerintah Gampong tersebut.

2. Kajian Pustaka

Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut pendapat Hidayat (2013) yang menjelaskan bahwa: 'Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya'.

Sedangkan pengertian efektivitas menurut pendapat Scheneerthon John (2014) adalah sebagai berikut: "Efektivitas adalah pencapaian target yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif.

Adapun pengertian efektivitas menurut pendapat Orasetio Saksono (2014) adalah: "Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input"

Dari beberapa pengertian efektivitas tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Penataan

Pengertian penataan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Badudu, Zein (2012) adalah:

"Penatanaan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah di mana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal, cara, hasil atau proses menata."

Penataan ini membutuhkan proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan. Dalam Kamus Tata Ruang Edisi I: (2013) menjelaskan bahwa :

"Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum"

Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sujarto (2012) menjelaskan bahwa :

"Penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan”

Permasalahan pembangunan tidak terlepas dari peran penataan ruang. Penataan ruang menjadi sangat penting karena dengan penataan ruang tersebut dapat menjamin terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur. Keadaan masyarakat yang tertib dan teratur akan mampu mendukung terselenggaranya pembangunan.

Administrasi

Para pakar administrasi banyak yang memberikan pandangan administrasi dari berbagai sudut pandang tergantung dari kacamata mereka masing-masing dan cara melihatnya, ada yang memandang administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian administrasi sempit dan pengertian administrasi dalam arti luas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang menurut pendapat para pakar administrasi antara lain, salah satunya adalah pengertian administrasi dalam arti sempit yang dikemukakan oleh The Liang Gie, (2013) adalah merupakan : “Pekerjaan yang berhubungan erat dengan kegiatan tulis menulis, pengetikan, pembukuan ringan, dokumentasi, arsip dan lain-lain”.

Pendapat lain tentang pengertian administrasi dalam arti sempit yang dikemukakan oleh Sarwoto, (2012) adalah merupakan: “Dalam pembicaraan sehari-hari administrasi yang dimaksud yaitu administrative dalam bahasa Belanda atau Administration dalam bahasa Inggris, dan ini berarti bahwa administrasi mencakup tugas-tugas pekerjaan pencatatan, kearsipan, surat menyurat dan lain-lain atau singkatnya tugas ketatausahaan”. Secara umum administrasi dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan

oleh orang-orang atau sekelompok orang untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan dan telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas, maka menurut pendapat Wayong, (2012) adalah merumuskan pengertian administrasi dalam arti luas yaitu merupakan :

“Kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan sesuatu usaha atau kegiatan yang bersifat merencanakan, mengorganisasikan dan memimpin, sedangkan dalam arti sempit administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat sesuatu yang terjadi dalam suatu usaha atau dengan administrasi untuk menjadi bahan keterangan bagi setiap pimpinan”.

Ilmu administrasi adalah ilmu yang membahas tentang usaha-usaha manusia dalam meningkatkan efisisensi dan efektifitas kerja dalam suatu kelompok di samping untuk mencatat metode dan alat kerja yang sempurna. Berlandaskan kepada uraian dan kutipan tersebut diatas, maka administrasi tersebut mempunyai unsur-unsur pokok yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sekelompok orang yang bekerjasama,
- b. Adanya proses atau rangkaian kerjasama yang rasional,
- c. Adannya tujuan yang hendak dicapai yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sehubungan dengan pendapat yang telah dikemukakan, maka ternyata bahwa pemerintah gampong juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas digampongnya, karena sehubungan dengan pelaksanaan tugas dikantor Keuchik yang menyangkut dengan berbagai kegiatan tertib administrasi.

Dari pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas adalah merupakan usaha kerjasama oleh setiap

kelompok manusia dalam suatu kegiatan untuk menyelenggarakan tugas bersama dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan dan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pemerintah Gampong

Dalam organisasi Pemerintahan Gampong, organisasi tingkat pemerintahan terendah dalam hirarkhis struktur organisasi Pemerintahan secara nasional adalah Pemerintah Gampong atau dengan kata lain Keuchik. Jadi Pemerintah Gampong yaitu mempunyai wewenang penuh untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku. Kata Pemerintah berasal dari bahasa Inggris 'Government' yang artinya kemudi.

Oleh karena itu secara subjektif dapat diartikan bahwa Pemerintah adalah pengemudi, pengendali dan penyelenggara. Sedangkan secara objeknya adalah segala kegiatan atau tugas-tugas yang menjadi kewajiban Pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Risdiyanti, (2013) adalah: "Pemerintah merupakan 'Penyelenggara' dengan kata lain Pemerintah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintahan".

Dari definisi diatas ini dapat memberikan pengertian bahwa: Pemerintah adalah orang-orang yang menjalankan tugas-tugas dibidang Pemerintahan dimana Pemerintah menjalankan tugas dan fungsi kenegaraan, dengan demikian dapat diartikan juga bahwa Pemerintah dimaksudkan adalah sebagai pihak-pihak penyelenggara tugas kenegaraan yang kepadanya melekat sejumlah wewenang, tugasnya dan fungsi kenegaraan baik ditingkat pusat sampai ke tingkat yang paling rendah yaitu: Gampong.

Sehubungan dengan adanya, wilayah dan masyarakat yang mempunyai kehidupan sosial serta kegiatan kemasyarakatannya

berdasarkan norma atau kaedah dan kebiasaan yang berlaku, maka disini perlu adanya seorang pemimpin yang dapat mengatur kehidupan kemasyarakatannya dan adat-istiadat yang telah berjalan berabad-abad silam dalam masyarakat tersebut, untuk itu maka diperlukan di tingkat Gampong yaitu kepala Gampong atau dengan kata lain Keuchik yang mampu mengurus hal tersebut diatas.

Dari kutipan atau uraian yang telah disajikan dan di kemukakan diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa: Gampong adalah merupakan wilayah yang didalamnya terdapat sejumlah orang-orang yang bergabung dalam ikatan masyarakat secara organisasi, dan Pemerintahan terendah yang dimaksudkan diatas yaitu Keuchik sebagai Kepala Gampong langsung bertanggung jawab dalam segala hal pada Imum Mukim dan Keuchik berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Jadi dengan kata lain bahwa pengertian Gampong berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 yaitu, tentang Pemerintah Gampong disebutkan bahwa: Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh seorang Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dengan dibantu Sekretaris dan Aparatur Gampong lainnya yang bertujuan untuk membangun Gampong lebih baik.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam dengan Keuchik, perangkat gampong, tokoh masyarakat, dan warga Gampong Krueng Reubee.
2. Observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan masyarakat dan gaya kepemimpinan yang diterapkan.
3. Studi dokumentasi untuk memperoleh data sekunder seperti arsip kegiatan, laporan keuangan, dan dokumen resmi gampong.

Lokasi Penelitian dilakukan di Gampong Sagoe Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah: "Pendataan Tertib Administrasi Pemerintahan Gampong dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Gampong Sagoe.

Pemilihan lokasi ini mudah dijangkau oleh peneliti sehingga bisa menghemat waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini.

Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah:

1. Reduksi data: memilah data penting, menyederhanakan, dan memfokuskan pada aspek yang relevan.
2. Penyajian data menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk naratif atau tabel untuk memudahkan pemahaman.
3. Penarikan kesimpulan membuat interpretasi akhir berdasarkan temuan yang diperoleh dan menjawab rumusan masalah.
4. Teknik analisis ini bertujuan untuk mengungkap makna mendalam dari gaya kepemimpinan Keuchik serta dampaknya terhadap pelayanan publik di Gampong Krueng Reubee

4. Pembahasan

Analisis Efektivitas Penataan Tertib Administrasi Pemerintah Gampong dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Gampong Gampong Sagoe Kecamatan Muara Tiga

Kabupaten Pidie.

Pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintahan Gampong Sagoe khususnya dalam bidang administrasi umum, administrasi kependudukan, dan lain-lain yang dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong Sagoe. Pelayanan administrasi umum menyangkut dengan pembuatan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar. Keputusan Gampong merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Gampong, dalam hal ini Keuchik selaku pimpinan Gampong berhak untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat tidak pernah dibuat dalam keputusan Gampong secara tertulis.

Sedangkan keputusan Gampong dilakukan untuk kepentingan penyaluran dana pembangunan Gampong yang berasal dari Pemerintahan atasan, hal ini dibuat oleh Kepala Urusan atau Kepala seksi pembangunan Gampong pada Pemerintahan Tingkat Kecamatan atas persetujuan Pemerintahan Gampong. Maksud tersebut adalah untuk memperlancar penyaluran dana pembangunan Gampong.

Sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan pelayanan administrasi pada Biokrasi Pemerintahan Gampong Gampong Sagoe kurang berjalan sebagai mana mestinya karena diperoleh keterangan bahwa keputusan Gampong tidak dilakukan secara tertulis oleh Pemerintah Gampong. Selanjutnya penelitian ini dilakukan pada pelayanan administrasi tentang kekayaan Gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan Gampong tidak dibukukan secara konsisten karena Pemerintahan Gampong yang mengerjakan buku kekayaan Gampong misalnya tanah sawah, tanah kebun dan lain-lain yang maksudnya berstatus pemilikan secara hukum

tradisional sehingga tidak ada penginventarisir dalam buku kekayaan Gampong yang dimaksud

Berkenaan dengan surat menyurat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong, Keuchik Gampong selalu mengeluarkan surat yang berhubungan dengan berbagai kepentingan masyarakat seperti memberikan surat keterangan dan surat-surat lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan administrasi Pemerintahan berkenaan dengan administrasi kependudukan Pemerintah Gampong perlu membuat buku induk penduduk, buku penduduk sementara, buku perubahan penduduk, buku perkembangan penduduk, buku kartu keluarga, dan buku jumlah penduduk. Buku induk penduduk adalah buku yang memuat identitas penduduk yang dikerjakan oleh Pemerintahan Gampong dalam rangka pelayanan administrasi penduduk.

Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa pelayanan administrasi bidang kependudukan di Gampong Gampong Sagoe telah dilakukan oleh Pemerintahan Gampong, meskipun penataan administrasi tersebut belum sepenuhnya sempurna.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penataan administrasi keuangan perlu ditata sedemikian rupa agar setiap ada penerimaan dan pengeluaran dapat diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan. Dari kenyataan yang ada bahwa Pemerintah Gampong Gampong Sagoe telah mengelola dana keuangan Gampong sesuai dengan prosedur yang ada, baik dana pembangunan Gampong maupun dana untuk kepentingan lainnya

Pendataan semua asset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak sebuah Gampong memiliki asset. Berdasarkan kenyataan menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Gampong Sagoe telah menata

semua asset atau inventaris Gampong, sehingga memudahkan bagi Pemerintah Gampong untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi inventaris atau asset Gampong.

Pelayanan administrasi Gampong khususnya dalam bidang administrasi umum, administrasi kependudukan, dan lain-lain dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong Gampong Sagoe. Pelayanan administrasi umum menyangkut dengan penataan semua surat menyurat telah dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat dan semua surat-surat tersebut telah diarsipkan sesuai dengan jenis masing-masing.

Analisis Hambatan yang Ditemui

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penataan administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong terhadap pelayanan publik, sehingga pelayanan yang dilaksanakan belum mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, hambatan dimaksud antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Pemerintah Gampong perlu dibekali dengan berbagai pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan administrasi Gampong agar mereka lebih cakap dalam menata administrasi untuk pelayanan publik, karena tanpa adanya pelatihan-pelatihan tersebut tidak mungkin pelayanan administrasi terlaksana secara maksimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong. Berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari ketiga Gampong yang dijadikan sampel sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan publik tidak memadai seperti komputer yang dibutuhkan 2 buah sedangkan yang ada hanya 1 buah dan prasarana lainnya juga kurang memadai dan belum ada Kantor

Keuchik tempat yang semestinya ada untuk pelayanan publik.

Ada beberapa Faktor yang menjadi hambatan dalam penelitian ini antara lain adalah

1. Kurangnya pembinaan yang dilakukan kepada pemerintah gampong yang dilakukan oleh pemerintah tasan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara dalam sebuah penelitian yang diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kebenaran dari hipotesis yang telah ditetapkan. Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas tentang hipotesis dalam penelitian ini berbunyi: "Pemerintah Gampong dalam Pendataan Tertib Administrasi guna Mewujudkan Pelayanan Publik di Gampong Gampong Sagoe Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, belum terlaksana secara maksimal, dikarenakan masih dijumpai berbagai faktor penghambat". Hal ini terbukti, sebagaimana data yang telah dikemukakan dalam hambatan yang dijumpai dalam penelitian diatas.

5. Kesimpulan Dan Saran

Beranjak kepada uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka di sini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan antara lain adalah :

1. Efektivitas Penataan Tertib Administrasi Pemerintah Gampong dalam Mewujudkan Pelayanan Publik di Gampong Gampong Sagoe Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie, belum terlaksana sebagaimana mestinya, dikarenakan dijumpai berbagai faktor penghambat,
2. Hambatan yang dijumpai antara lain adalah Pemerintah Gampong kurang cakap dalam menata administrasi untuk pelayanan publik sehingga pelayanan

yang diberikan kurang memuaskan, sesuai dengan kenyataan yang diperoleh Pemerintah Gampong tidak pernah dibekali dengan pelatihan-pelatihan tentang administrasi Gampong sehingga pelayanan yang diberikan kurang mencapai sasaran,

3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Gampong. Berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari Gampong Gampong Sagoe yang mana sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelayanan publik tidak memadai seperti untuk membuat sebuah surat harus menunggu lama karena komputer yang ada hanya satu buah.

Saran-Saran

1. Disarankan supaya Pemerintah atasan dalam Pemilihan Perangkat Gampong lebih memperhatikan latar belakang pendidikan dan memberikan pelatihan-pelatihan tentang administrasi gampong karena faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memberikan pelayanan publik,
2. Disarankan hendaknya disetiap Gampong Kantor Keuchik Perlu diaktifkan supaya penataan administrasi dalam rangka pelayanan publik dapat terlaksana secara kontinue dan terorganisir serta sistematis dan perlu pengadaan komputer.

Daftar Pustaka

- Ainii, A. Q. (2019). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Desa Pongkok Kecamatanamatan Polanharjo Kabupatenupaten Klaten. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(02), 11-20.
- Arianto, B. Warjio, Usman T. (2016). Kepemimpinan Lurah dalam

- Meningkatkan Motivasi Kerja Perangkat Kelurahan, Jurnal Administrasi Publik, 6 (2): 107-122.
- Arsip Nasional Republik Indonesia (2011), *Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, tentang Pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Perguruan Tinggi*.
- Arifatullah, A., Gunawan, E., & Munandar, A. (2025). Efektivitas Penataan Tertib Administrasi Pemerintah Gampong Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Di Gampong Teubeng Dayah Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 4(1).
- Baratha, I, Nyoman (2012), *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dewi, I, C, (2011) *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: PT Prestasi Pustakary
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.
- FPTK IKIP. Volume 20 (1): 83-84. Hajar, Siti. 2016. Studi Tentang Kearsipan Dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 4 (3): 1264-1265.
- Hoesein Bhenyamin (2012) *Manajemen pelayanan Umum*, Bumi Aksara: Jakarta
- Jarah, I., & Zulfikar, Z. (2023). Kinerja Keuchik Gampong Raya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Dalam Menjalankan Fungsi Dan Peranannya Terhadap Pembangunan. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 2(1).
- Kuswantoro, A (2017), *Pengelolaan Arsip Dinamis Dalam Upaya Pelayanan Prima Bagi Tenaga Kepependidikan Pasca Sarjana UNNES*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Kartono, Kartini. (2010). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. PT. Raja.Grafindo Persada Jakarta.
- Lehtinen (2013), *Strategi pelayanan Prima*, Bina Aksara: Jakarta
- Mulyadi & Rivai. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Letakan Kesembilan.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Norman (2013) *Pelayanan Prima di Sektor Publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Osborn dan Gaebler (2014) *Reinventing Government*
- Rahman, Idzhari. "Rasionalitas pada Gaya Kepemimpinan Direktur Perpustakaan Universitas Islam Indonesia." *Jurnal Pustaka Ilmiah* 7.1: 45-53. (2021).
- Rahmi, Hayatur, dkk. 2012. *Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Studi Kualitatif di Badan kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmu Komusikasi. Volume 1 (1): 5-6
- Rivai, veithzal. 2014. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Risdianyanti (2013) *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam pembangunan*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Rijal, A., & Ilyas, M. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Publik di Desa X. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45-55
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi*

- Negara (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rijal, A., & Ilyas, M. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Implikasinya yang Terhadap Pelayanan Publik di Desa X. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 45-55
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Rajawali Pers
- Rozaili, R., & Zulfikar, Z. (2022). Strategi Pengelolaan Apbg Dalam Mencegah Wabah Covid-19 Di Gampong Krueng Dhoue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. *Jurnal Sains Riset*, 12(2), 270-277.
- Sarwoto (2012) *Fungsi Administrasi Negara*, Bina Aksara: Jakarta
- Sarwoto (2012) *Fungsi Administrasi Negara*, Bina Aksara: Jakarta
- SemarangSumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1) 47-56
- Sangpujangga. 2014. Pengaruh Kepemimpinan Kepala desa.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. Sukmadinata,
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV. Sukmadinata,
- Sugiarto, A, & Teguh W (2015), *Manajemen Kearsipan Modern Dari Konvensional ke Basis Komputer* (Klitren Lor GK
- Tjiptono (2013) *Model dan Kualitas Pelayanan*, Rajawali press: Jakarta
- The Liang Gie (2013), *Organisasi dan Manajemen Kantor*, Perct. Ref Medan
- Umar. (2018). Pengertian Kepemimpinan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Semarang
- Wayong (2012) *Fungsi Administrasi Negara, Djambatan*: Jakarta
- Wibowo, A. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja Aparatur Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Desa*, 8(1), 33-45
III/15 Yogyakarta: Gava Media.
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Zulkifli, Z. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Keuchik Terhadap Efektivitas Pelayanan Masyarakat Di Gampong Kumbang Kecamatan Mila. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 11(1), 303-313.
- Zulfikar, Z., Rozaili, R., & Marjani, N. (2023). Efektivitas Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Sosial Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 246-256.